

PENGARUH KELENGKAPAN PRODUK HUKUM KEUANGAN PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) DPRD KOTA BANDUNG

Oleh:

¹Binta Sekarlia Ilfani, ²Anry Firmansyah

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Departemen Ilmu Terapan,
Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 42363

e-mail : binta22001@mail.unpad.ac.id¹, anry.firmansyah@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the completeness of public financial legal documents in the JDIH of the Bandung City DPRD on public participation by applying the DeLone and McLean model. The research employed a quantitative approach involving 110 respondents and was analyzed using SEM-PLS. The results indicate that service quality and net benefits have a positive and significant effect on public participation, while system quality and information quality have a negative and significant effect. Use and user satisfaction do not have a significant effect. The model demonstrates moderate explanatory power ($R^2 = 0.582$). These findings confirm that public participation is more strongly influenced by perceived tangible benefits and the quality of service interaction than by the technical aspects of the system.

Keywords: JDIH, Public Participation, Completeness of Legal Documents, DeLone and McLean Model

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kelengkapan produk hukum keuangan publik pada JDIH DPRD Kota Bandung terhadap partisipasi publik dengan menggunakan model DeLone dan McLean. Penelitian dilakukan secara kuantitatif terhadap 110 responden dan dianalisis menggunakan SEM-PLS. Hasil menunjukkan bahwa kualitas layanan dan manfaat bersih berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi publik, sedangkan kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh negatif signifikan. Penggunaan dan kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan. Model memiliki kemampuan penjelasan moderat ($R^2 = 0,582$). Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi publik lebih ditentukan oleh persepsi manfaat nyata dan kualitas interaksi layanan dibandingkan aspek teknis sistem.

Kata Kunci: JDIH, Partisipasi Publik, Kelengkapan Produk Hukum, Model DeLone dan McLean

PENDAHULUAN

Untuk menjamin keterbukaan informasi secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagaimana di atur oleh Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012. Dalam hal tersebut, setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diwajibkan membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam menyajikan dokumentasi hukum yang akurat, sistematis, dan dapat diakses publik.

Pemanfaatan sistem JDIH ini terbukti mampu mempercepat distribusi dokumen hukum dan memperkuat keterbukaan informasi publik yang berdampak pada transparansi tata kelola kelembagaan (Indrawijaya et al., 2025). Keberadaan JDIH DPRD Kota Bandung mencerminkan upaya digitalisasi dokumentasi hukum di lingkungan legislatif daerah. Melalui portal ini, publik, media, maupun para pemangku kepentingan dapat mengakses berbagai produk hukum, termasuk yang terkait dengan keuangan publik, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran pemerintah daerah (Haekal Septiawan et al., 2025).

Inovasi nyata yang telah dijalankan seperti program *Warong JDIH*, sosialisasi santai (*SANTAI*), *Goes to Campus*, penggunaan maskot Kang JE-De & Teh I-Ha, serta pemberian penghargaan tingkat nasional menunjukkan komitmen tinggi dalam memperluas akses dan meningkatkan awareness publik terhadap JDIH. Namun di balik pencapaian tersebut, terdapat dinamika menarik dalam dokumentasi hukum yang tersedia, khususnya terkait komposisi jenis produk hukum keuangan publik yang terdokumentasi.

Namun di balik pencapaian tersebut, terdapat dinamika menarik dalam dokumentasi hukum yang tersedia, khususnya terkait komposisi jenis produk hukum keuangan publik yang terdokumentasi. Pada data di web <https://jdih.dprd.bandung.go.id>, Peraturan Daerah terdata sebanyak 135 dokumen (15,29%) menempati peringkat ketiga yang menunjukan bahwa Perda sebagai instrumen hukum utama dalam pengesahan APBD dan kebijakan fiskal lainnya, telah terpublikasi dengan cukup baik. Namun, persentase ini masih berada di bawah Keputusan DPRD yang mencapai 202 dokumen (23,33%), yang umumnya memiliki karakter prosedural dan administratif internal. Adapun Rancangan Peraturan Daerah hanya berjumlah 15 dokumen, sementara Naskah Akademik yang menjadi landasan penting dalam penyusunan Perda hanya tercatat sebanyak 14 dokumen (1,62%). Risalah Rapat yang berperan dalam mendokumentasikan proses pembahasan anggaran dan pengawasan oleh DPRD, hanya mencatat 30 dokumen termasuk angka yang tergolong rendah.

Sebagian besar dokumen yang diunggah dalam rentang waktu tersebut masih di dominasi oleh produk hukum yang bersifat internal dan administratif, seperti Keputusan DPRD yang umumnya merupakan tindak lanjut teknis dari proses legislasi. Sementara itu, dokumen-dokumen yang secara substansial berhubungan langsung dengan siklus anggaran daerah, seperti Peraturan Daerah tentang APBD, Naskah Akademik, serta Risalah Rapat pembahasan anggaran, masih tergolong terbatas jumlahnya dan tidak merata dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini, Keputusan DPRD lazim digunakan untuk mengatur persoalan teknis dan administratif yang bersifat rutin dan mendesak misalnya penetapan tata tertib, maupun penetapan Propemperda sehingga jumlahnya lebih banyak karena tidak melalui proses legislasi panjang (Khatimah Djafar et al., 2024). Sementara itu, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibentuk melalui mekanisme legislatif resmi antara DPRD dan kepala daerah yang melibatkan birokrasi kompleks, fasilitasi, dominasi eksekutif, serta

intervensi pemerintah pusat yang membatasi produktivitas perda (Sri Mulyono et al., 2020.). Kondisi ini sejalan dengan temuan (Haekal Septiawan et al., 2025.) bahwa JDIH DPRD lebih banyak memuat dokumen administratif karena lebih mudah diproses, sedangkan perda jarang terdokumentasi akibat panjangnya tahapan legislasi.

Fenomena dominasi produk hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor sifat administrasi, JDIH DPRD Kota Bandung memiliki kendala keterbatasan kapasitas teknis dari sistem penyimpanan di JDIH DPRD Kota Bandung tersebut. Sistem digital yang digunakan hingga saat ini belum sepenuhnya mampu menampung dokumen berukuran besar, khususnya dokumen Peraturan Daerah yang mengatur pengesahan maupun pertanggungjawaban APBD dengan format kompleks dan lampiran panjang yang membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar. Kondisi ini menyebabkan banyak dokumen strategis tersebut tidak dapat diunggah ke dalam sistem.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, setiap peraturan perundang-undangan wajib dilengkapi dengan abstrak, yang berfungsi memberikan uraian singkat mengenai substansi pengaturan, memudahkan para pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran awal peraturan. Ketentuan mengenai kewajiban abstrak ini berlaku untuk seluruh jenis peraturan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Namun dalam praktiknya, produk hukum yang diunggah melalui JDIH DPRD Kota Bandung, khususnya Peraturan Daerah (Perda), masih ada yang belum dilengkapi dengan abstrak. Ketidaklengkapan ini berimplikasi pada pemahaman awal bagi pengguna, sehingga publik kerap harus membuka keseluruhan dokumen untuk memahami konteks.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelengkapan produk hukum keuangan publik yang dipublikasikan melalui JDIH DPRD Kota Bandung terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keterbukaan informasi serta keterlibatan publik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel kelengkapan produk hukum keuangan publik terhadap variabel partisipasi publik di JDIH DPRD Kota Bandung, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kelengkapan dokumen memengaruhi keterlibatan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori DeLone & McLean (IS Success Model)

(DeLone & McLean, 2003) dalam artikelnya *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update* menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan nilai bagi penggunaannya. Model ini menekankan bahwa sistem informasi bukan hanya sekadar instrumen teknologi, melainkan sebuah mekanisme yang menghubungkan kualitas pengelolaan informasi dengan partisipasi serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Perspektif ini penting dimana sistem informasi publik seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berfungsi sebagai sarana utama untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas produk hukum. Teori ini akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana kelengkapan produk hukum keuangan publik di JDIH DPRD Kota Bandung dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) mencakup enam dimensi yang saling berkaitan, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai faktor penentu awal; penggunaan dan kepuasan pengguna sebagai respons

terhadap kualitas tersebut; serta manfaat bersih sebagai dampak akhir dari penerapan sistem. Kualitas sistem menekankan reliabilitas dan kemudahan penggunaan, kualitas informasi mencakup akurasi dan relevansi, sementara kualitas layanan menilai dukungan teknis yang diberikan. Selanjutnya, tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna merefleksikan penerimaan masyarakat terhadap sistem, yang pada akhirnya bermuara pada manfaat nyata yang dihasilkan bagi individu maupun institusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal yang berlandaskan paradigma positivistik, yang memandang bahwa fenomena sosial dapat diukur secara objektif melalui instrumen yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2023). Objek penelitian adalah pengaruh kelengkapan produk hukum keuangan publik terhadap partisipasi publik pada JDIH DPRD Kota Bandung. Populasi target mencakup seluruh pengguna JDIH DPRD Kota Bandung, baik masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum yang pernah mengakses produk hukum keuangan publik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden pernah mengakses JDIH dan menggunakan dokumen hukum keuangan publik, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian (Budiastuti dan Bandur, 2018). Penentuan ukuran sampel mengacu pada aturan sepuluh kali (*10 times rule*) dalam PLS-SEM, yaitu minimal sepuluh kali jumlah indikator terbanyak pada konstruk endogen (Ringle et al. (2023). Dengan jumlah indikator terbesar sebanyak 11, maka ukuran sampel minimum yang disyaratkan adalah 110 responden.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan konstruksi teoritik model kesuksesan sistem informasi yang diadaptasi pada konteks JDIH. Variabel kelengkapan produk hukum keuangan publik (X) dioperasionalkan melalui enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih, yang masing-masing diukur melalui sejumlah indikator reflektif. Variabel partisipasi publik (Y) diukur melalui dimensi umpan balik dan pengawasan masyarakat terhadap informasi hukum yang tersedia. Seluruh item pernyataan diukur menggunakan skala Likert empat poin (1 = sangat tidak setuju hingga 4 = sangat setuju) untuk menghindari pilihan netral dan meningkatkan ketegasan respons (Shidki & Yusoff, 2024). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares (SEM-PLS)* guna menguji hubungan kausal antar konstruk secara simultan.

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara daring (online) kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian selama periode pengambilan data. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan partisipasi responden secara sukarela (*informed consent*). Validitas instrumen diuji melalui validitas konstruk pada tahap evaluasi model pengukuran (*outer model*) dalam pendekatan SEM-PLS, dengan kriteria *factor loading* > 0,70, *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,50, serta *Composite Reliability (CR)* > 0,70 (Hair et al., 2021). Selain itu, reliabilitas internal dievaluasi menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan nilai minimum 0,70 sebagai indikator konsistensi pengukuran yang memadai.

Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares (SEM-PLS)* melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0, yang dipilih karena mampu menganalisis model struktural yang bersifat kompleks, tidak mensyaratkan normalitas multivariat, serta sesuai untuk penelitian berbasis prediksi (Hair et al., 2021) (Hair et al. 2021). Evaluasi model dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) *outer model*

assessment untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk, serta (2) *inner model assessment* untuk menguji hubungan antar konstruk laten dengan melihat nilai *koefisien determinasi* (R^2), *predictive relevance* (Q^2), dan *effect size* (f^2). Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsample untuk memperoleh nilai *t-statistic* dan *p-value*, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai dasar pengambilan keputusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden penelitian menunjukkan bahwa dari 110 responden yang berpartisipasi, mayoritas berada pada kelompok usia 21–30 tahun (53,6%), diikuti usia 17–20 tahun (31,8%) dan 31–40 tahun (14,5%). Berdasarkan pekerjaan, responden didominasi oleh mahasiswa (45,45%), kemudian Sekretariat DPRD (18,18%), akademisi (18,18%), serta pelajar dan pegawai masing-masing sebesar 9,09%. Analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa seluruh konstruk berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata skor tertinggi terdapat pada partisipasi publik dan kualitas layanan 354, diikuti kepuasan pengguna dan manfaat bersih 342, kualitas sistem 328, penggunaan 325, serta kualitas informasi 304. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian berada di atas nilai tengah skala pengukuran.

Evaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran menunjukkan hasil yang memadai pada seluruh konstruk penelitian. Hasil analisis outer model mengindikasikan bahwa indikator yang dipertahankan memiliki nilai factor loading di atas 0,70 dengan rentang 0,711 hingga 0,918, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruh konstruk berada di atas ambang batas 0,50, yaitu X1 (0,696), X2 (0,695), X3 (0,676), X4 (0,724), X5 (0,635), X6 (0,593), dan Y1 (0,705), yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Reliabilitas internal juga terpenuhi dengan nilai Composite Reliability (CR) berkisar antara 0,874 hingga 0,913 dan Cronbach's Alpha antara 0,809 hingga 0,875, seluruhnya melampaui batas minimum 0,70. Temuan ini menegaskan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas untuk dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktural.

Tabel 1. Hasil Validitas dan Realibilitas Konstruk

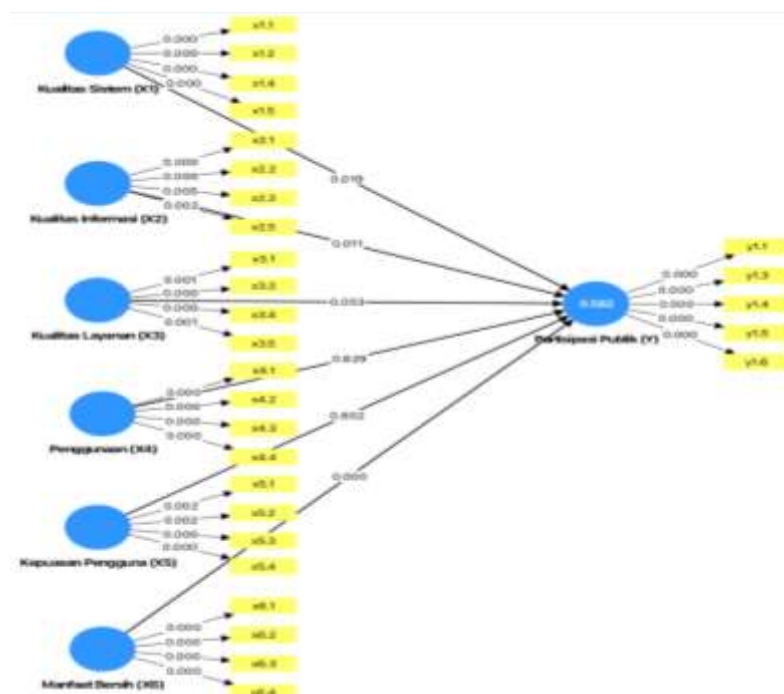
Konstruk	Items	Factor Loading Range	AVE	CR	Cronbach's α
X1	4	0,774-0,904	0,696	0,901	0,861
X2	4	0,729-0,908	0,695	0,900	0,854
X3	4	0,742-0,890	0,676	0,893	0,839
X4	4	0,774-0,918	0,724	0,913	0,875
X5	4	0,753-0,893	0,635	0,874	0,809
X6	4	0,724-0,836	0,593	0,879	0,828
Y1	5	0,711-0,847	0,705	0,905	0,861

Evaluasi model struktural menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang memadai terhadap partisipasi publik. Nilai R-square sebesar 0,582 mengindikasikan bahwa 58,2% varians partisipasi publik dapat dijelaskan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih, sedangkan sisanya sebesar 41,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai *Q-square predictive relevance* sebesar 0,497 (> 0) mengonfirmasi bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik dalam menjelaskan konstruk endogen. Hasil

pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 subsample pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan manfaat bersih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi publik, sementara penggunaan dan kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan partisipasi publik berada pada kategori moderat dengan kontribusi dominan berasal dari variabel manfaat bersih.

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis Model Struktural

Hipotesis	Hubungan Antar Konstruk	t-value	p-value	Keputusan
H1	Kualites Sitem → Partisipasi Publik	2,350	0,019	Diterima
H2	Kualitas Informasi → Partisipasi Publik	2,533	0,011	Diterima
H3	Kualitas Layanan → Partisipasi Publik	2,960	0,003	Diterima
H4	Penggunaan → Partisipasi Publik	0,483	0,629	Ditolak
H5	Kepuasan Pengguna → Partisipasi Publik	0,250	0,802	Ditolak
H6	Manfaat Bersih → Partisipasi Publik	10,195	0,000	Diterima



Gambar 1. Model Struktural dan Path Coefficients

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi publik ($\beta = -0,164$; $t = 2,350$; $p = 0,019$). Dalam kerangka *DeLone* dan *McLean* (2003), kualitas sistem merepresentasikan karakteristik teknis seperti reliabilitas, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan waktu respons. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan performa teknis sistem tidak secara langsung mendorong keterlibatan publik dalam proses kebijakan. Sistem yang semakin stabil dan efisien cenderung memfasilitasi pola konsumsi informasi yang bersifat pasif, di mana pengguna memperoleh informasi secara cepat tanpa terdorong untuk melakukan interaksi lebih lanjut (Xhafka et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan teknis sistem belum tentu bertransformasi menjadi perilaku partisipatif yang aktif.

Kualitas informasi juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi publik ($\beta = -0,172$; $t = 2,533$; $p = 0,011$). Dalam model *DeLone* dan *McLean*, kualitas informasi mencakup dimensi akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan

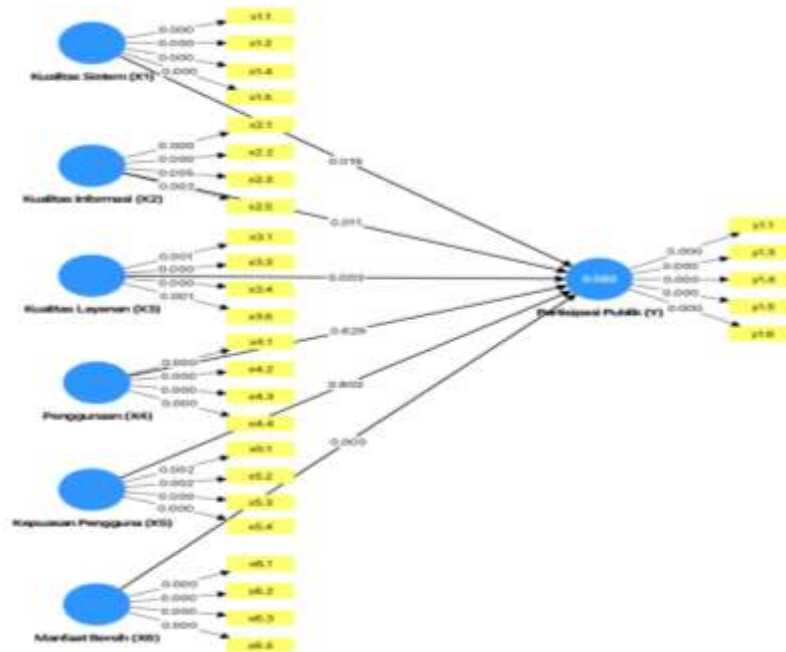
waktu. Secara konseptual, informasi yang berkualitas tinggi diasumsikan mampu meningkatkan pemahaman publik dan memperluas peluang partisipasi. Namun demikian, temuan empiris memperlihatkan bahwa penyajian informasi yang semakin lengkap dan komprehensif justru dapat menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi, bukan sebagai aktor deliberatif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketersediaan informasi semata tidak cukup untuk membangun partisipasi, karena keterlibatan publik juga dipengaruhi oleh persepsi relevansi personal, rasa memiliki, serta keyakinan bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata terhadap proses kebijakan (Pebriyanto et al., 2024).

Berbeda dengan dua dimensi tersebut, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik ($\beta = 0,226$; $t = 2,960$; $p = 0,003$). Dimensi ini merefleksikan responsivitas, jaminan, empati, serta dukungan institusional dalam penyelenggaraan layanan. Signifikansi hubungan ini menegaskan bahwa aspek relasional dan interaktif memiliki posisi strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat (Al-Naimat, 2024). Partisipasi publik dalam sistem kebijakan digital tidak hanya membutuhkan akses terhadap informasi, tetapi juga memerlukan mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan dialog dan umpan balik. Oleh karena itu, kualitas layanan yang responsif berkontribusi pada pembentukan kepercayaan serta memperkuat kecenderungan masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Variabel penggunaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi publik ($t = 0,483$; $p = 0,629$), sehingga mengindikasikan bahwa tingkat intensitas penggunaan sistem belum tentu berkorelasi dengan keterlibatan partisipatif masyarakat. Dalam konteks sistem informasi publik, penggunaan lebih merepresentasikan aspek adopsi teknis dan pemanfaatan administratif, bukan keterlibatan deliberatif dalam proses kebijakan. Sejalan dengan itu, kepuasan pengguna juga tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi publik ($t = 0,250$; $p = 0,802$). Meskipun dalam model *DeLone* dan *McLean* kepuasan diposisikan sebagai evaluasi afektif atas pengalaman penggunaan sistem, hasil ini menegaskan bahwa kepuasan individual tidak secara otomatis terkonversi menjadi partisipasi kolektif, yang pada hakikatnya menuntut dimensi motivasional, normatif, serta persepsi manfaat publik yang lebih luas.

Dimensi manfaat bersih (net benefits) menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap partisipasi publik ($\beta = 0,652$; $t = 10,479$; $p = 0,000$), dengan kekuatan koefisien paling dominan dalam model. Dalam perspektif *DeLone* dan *McLean*, manfaat bersih merepresentasikan dampak akhir sistem terhadap individu maupun organisasi, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan nilai publik. Dominannya pengaruh variabel ini menunjukkan bahwa partisipasi publik sangat ditentukan oleh persepsi terhadap manfaat konkret yang dihasilkan sistem (Nurlinah et al., 2025). Ketika sistem mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata dan dirasakan secara langsung, kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi meningkat secara signifikan.

Secara keseluruhan, pola hubungan struktural memperlihatkan bahwa dimensi teknis sistem tidak secara langsung memperkuat partisipasi publik, bahkan menunjukkan arah negatif yang signifikan. Sebaliknya, dimensi relasional dan terutama dimensi outcome memiliki kontribusi yang lebih menentukan. Temuan ini memperluas pemahaman atas model *DeLone* dan *McLean* dalam konteks sistem informasi kebijakan publik, dengan menegaskan bahwa keberhasilan sistem tidak semata diukur dari kualitas teknis dan kepuasan pengguna, melainkan dari sejauh mana sistem menghasilkan nilai publik yang mampu mendorong partisipasi yang bermakna.



Gambar 2. Model Struktural dan Path Coefficients

Temuan paling dominan ditunjukkan oleh variabel manfaat bersih (net benefits) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik ($\beta = 0,652$; $t = 10,479$; $p = 0,000$). Nilai koefisien yang tinggi menunjukkan bahwa manfaat bersih merupakan determinan utama dalam model. Dalam perspektif *DeLone* dan *McLean*, manfaat bersih merepresentasikan dampak akhir sistem terhadap individu maupun organisasi, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan nilai publik. Kuatnya pengaruh jalur ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik meningkat ketika masyarakat merasakan dampak nyata dari keberadaan sistem, bukan sekadar kemudahan akses atau kepuasan penggunaan. Dengan demikian, keberhasilan JDIH DPRD Kota Bandung dalam mendorong partisipasi publik lebih ditentukan oleh sejauh mana sistem menghasilkan nilai substantif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pola hubungan struktural ini menegaskan bahwa dalam konteks sistem informasi kebijakan publik, dimensi outcome berupa manfaat bersih memiliki daya jelaskan yang lebih kuat dibandingkan dimensi teknis dan instrumental. Model *DeLone* dan *McLean* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak tumbuh secara otomatis dari kualitas sistem dan informasi, melainkan berkembang ketika sistem menghasilkan dampak yang dirasakan bermakna oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengonfirmasi bahwa dalam konteks JDIH DPRD Kota Bandung, tidak seluruh dimensi dalam model *DeLone* dan *McLean* berkontribusi secara seragam terhadap partisipasi publik. Manfaat bersih (*net benefits*) terbukti sebagai determinan paling dominan dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik, diikuti oleh kualitas layanan yang juga menunjukkan pengaruh positif signifikan. Sebaliknya, kualitas sistem dan kualitas informasi menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sedangkan penggunaan dan kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan. Model struktural yang dikembangkan memiliki kemampuan penjelasan yang moderat

dengan nilai R-square sebesar 0,582 pada konstruk partisipasi publik, serta nilai Q-square sebesar 0,497 yang mengindikasikan relevansi prediktif yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi publik dalam sistem informasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh performa teknis sistem atau tingkat kepuasan pengguna, melainkan terutama oleh persepsi terhadap manfaat nyata yang dihasilkan sistem dalam meningkatkan transparansi, aksesibilitas regulasi, dan nilai publik.

Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya pengembangan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean dalam konteks tata kelola kebijakan publik digital, dengan menunjukkan bahwa dimensi *outcome-oriented*, khususnya manfaat bersih, memiliki daya jelaskan yang lebih kuat dibandingkan dimensi teknis maupun afektif. Temuan ini juga mengindikasikan adanya pergeseran orientasi evaluasi keberhasilan sistem informasi publik dari sekadar keberfungsian teknis menuju penciptaan dampak substantif bagi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi strategis bagi pengelola JDIH untuk memprioritaskan optimalisasi nilai guna dan relevansi kebijakan bagi publik, disertai penguatan kualitas layanan yang interaktif dan responsif. Model yang dihasilkan dapat menjadi rujukan evaluatif bagi implementasi JDIH di daerah lain, dengan penyesuaian terhadap karakteristik institusional dan dinamika partisipasi lokal, sehingga berkontribusi pada penguatan kerangka evaluasi sistem informasi kebijakan berbasis nilai publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Naimat, A. M. (2024). *The impact of service quality on citizen engagement in e-government*. International Journal of Advanced and Applied Sciences. Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara. Pustaka Setia.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Djafar, H. K., Husen, L. O., & Risma, A. (2024). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 808-826. Retrieved from <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/186>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). MANAJEMEN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM MELALUI IMPLEMENTASI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS JAMBI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(2), 648–663.
- Nurlinah, Ansar, M. C., & Chowdhury, K. (2025). Impact of government digital transformation on citizen trust and participation: Evidence from Gowa Regency, Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*, 7, 1700582. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1700582>

- Pebriyanto., Jumanah., & Sutoto. (2024). Analisis implementasi e-participation dalam kebijakan publik di Indonesia berdasarkan literature review. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2).
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). *A perspective on using partial least squares structural equation modelling in data articles*. *Data in Brief*, 48, 109348. Elsevier.
- Septiawan, M. H., & Junaidi, M. (2025). *Implementasi tugas pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan e-governance*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri, S. (2023). Strategi komunikasi DPRD Kota Bandung dalam mensosialisasikan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 55–66.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Khafka, E., Sinoimeri, D., & Teta, J. (2024). Evaluating the impact of e-governance on public service improvement in Albania: A quantitative analysis. *Sustainability*, 16, 10896. Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis penelitian kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2). E-ISSN 2685-2527. <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/24/10896/htm>
- Yusoff, A. S. M., Peng, F. S., Abdul Razak, F. Z., Syed Mustapa, S. I., Saaban, S., & Md. Salleh, S. (2024, Februari). *Penggunaan penengah dalam skala Likert: Kajian retrospektif maklum balas kepuasan pelanggan IPG* [Makalah konferensi]. Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.